PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Selasa Tanggal: 22 Agustus 2017 Halaman: 9

UPT Malioboro Perlu Diperkuat

JOGJA, BERNAS -- Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mengusulkan penguatan peran dengan peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro sehingga mampu memiliki lebih banyak wewenang dalam menangani kawasan Malioboro.

"Dari pada rencana Pemerintah DIY untuk membentuk sekretariat bersama yang kami nilai kurang efektif, akan lebih baik jika peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro dikuatkan. Kecuali jika Pemerintah DIY membentuk UPT khusus yang menangani kawasan sumbu filosofis," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri di Yogyakarta, Senin (21/8).

Selama ini, menurut Nasrul, peran UPT Malioboro hanya sebatas pada pemeliharaan saja sehingga kewenangan yang dimiliki tersebut belum mampu menyelesaikan beragam permasalahan yang dihadapi kawasan utama tujuan wisata di Yogyakarta itu. "Misalnya saja, UPT Malioboro tidak bisa menambah kamera CCTV karena tidak memiliki kewenangan anggaran untuk itu. Mereka hanya bisa melakukan pemeliharaan," katanya.

Selain itu, Nasrul juga menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan di kawasan Malioboro seperti yang terjadi di depan Pasar Beringharjo yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta serta di selatan Pasar Sore yang sudah menjadi daerah kewenangan Pam Budaya.

"Selama ini, orang hanya tahu jika UPT Malioboro memiliki kewenangan dari ujung utara Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer. Tetapi, ada beberapa segmen yang tidak masuk dalam kewenangan UPT. Tentunya, harus ada komunikasi," kata Nasrul Khoiri.

Jika Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penguatan peran UPT, menurut Nasrul, maka jabatan kepala UPT pun harus dinaikkan sehingga mampu melakukan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi. Meski demikian, Nasrul mengapresiasi kinerja UPT Malioboro untuk melakukan pengelolaan kawasan Malioboro. "Sejauh ini, UPT sudah menunjukkan kinerja yang baik meskipun mengalami keterbatasan peran dan fungsi," katanya.

Sebelumnya, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan akan menguatkan peran UPT Malioboro agar memiliki kemampuan koordinasi yang lebih optimal. "Selama ini, faktor koordinasi masih kurang

▶ ke hal 15

Instansi
1. .....
2. .....

Tindak Lanjut
☐ Untuk Ditanggapi

UPT Malioboro

Sambungan dari halaman 9

maksimal sehingga terkadang UPT Malioboro terlihat tidak bisa bertindak tegas. Pada intinya, tinggal melakukan penguatan koordinasi antar instansi saja," kata Haryadi.

Setidaknya ada tujuh organisasi perangkat daerah yang akan menjadi bagian koordinasi dari UPT Malioboro yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata serta Dinas Perhubungan. **(ant/phj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro 2. Dinas Pariwisata	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005